

Relevansi Kepemimpinan Ratu Kalinyamat terhadap Model Kepemimpinan Perempuan di Era Pemerintahan Modern

Uswatun Khasanah¹, Agus Khunaifi²

UIN Walisongo Semarang¹, UIN Walisongo Semarang²

Email: uswatunkhasanah2336@gmail.com, agus_khunaifi@walisongo.ac.id

Abstract: *This article analyzes the relevance of Queen Kalinyamat's leadership (16th century) as a model for women's leadership in the modern era of government, amid structural and cultural challenges that still limit women's participation in contemporary politics. Using library research methods, this study aims to highlight the existence, capacity, and legitimacy of women's roles in modern government through historical reflections on Queen Kalinyamat's achievements. The results of the analysis show that Queen Kalinyamat was a strategic leader, a respected maritime military commander, a visionary in trade, and a skilled diplomat. She succeeded in stabilizing the Jepara region, developing maritime power, and challenging foreign domination, demonstrating that leadership effectiveness is not determined by gender, but rather by strategic ability, political vision, and courage. This study concludes that the story of Queen Kalinyamat provides a strong historical foundation for strengthening the legitimacy and role of women in modern politics, challenging masculine narratives and postcolonial social constructs that impose limitations. She affirms that women's leadership capacity is an integral part of the political experience of the archipelago.*

Keywords : *Woman Leadership, Queen Kalinyamat, Leadership Model.*

Abstract : Artikel ini menganalisis relevansi kepemimpinan Ratu Kalinyamat (abad ke-16) sebagai model bagi kepemimpinan perempuan di era pemerintahan modern, di tengah tantangan struktural dan kultural yang masih membatasi partisipasi perempuan dalam politik kontemporer. Menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi ini bertujuan menyoroti eksistensi, kapasitas, dan legitimasi peran perempuan dalam pemerintahan modern melalui refleksi historis kiprah Ratu Kalinyamat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat adalah pemimpin strategis, militer maritim yang disegani, visioner dalam perdagangan, serta diplomat yang ulung. Ia berhasil menstabilkan wilayah Jepara, mengembangkan kekuatan maritim, dan menantang dominasi asing, menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan strategis, visi politik, dan keberanian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kisah Ratu Kalinyamat menjadi fondasi historis yang kuat untuk memperkuat legitimasi dan peran perempuan dalam politik modern, menentang narasi maskulin dan konstruksi sosial pascakolonial yang membatasi. Ia menegaskan bahwa kapasitas kepemimpinan perempuan adalah bagian integral dari pengalaman politik Nusantara.

Kata kunci : Kepemimpinan Perempuan, Ratu Kalinyamat, Model Kepemimpinan.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan seringkali masih dipandang sebagai sebuah perjuangan dalam konteks politik modern. Stereotip budaya yang mengidentikkan kepemimpinan dengan sifat maskulin seringkali kali meminggirkan perempuan, seolah

peran mereka hanyalah pelengkap dalam pengambilan keputusan publik. Realitas politik kontemporer menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di ranah kekuasaan masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang dilandasi oleh tatanan patriarki yang telah tertanam dalam masyarakat (Aula, 2023).

Salah satu tokoh yang patut diangkat kembali ke dalam dialog akademik adalah Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara abad ke-16. Ia dikenal sebagai pemimpin maritim yang disegani di Asia Tenggara. Penelitian terkini menegaskan bahwa masa kepemimpinannya menyoroti kapasitas strategi politik, ketegasan militer, serta visi perdagangan internasional yang modern untuk ukuran zamannya. Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang menjadi pusat kekuatan laut terbesar di Nusantara, bahkan berani mengirim ekspedisi angkatan laut ke Malaka untuk menantang dominasi Portugis sebuah pencapaian luar biasa yang jarang mendapat sorotan dalam historiografi (Inez Kalyana Azmi, 2024).

Pengangkatan kembali figur ini tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya meromantisasi sejarah, melainkan sebuah kritik terhadap narasi kepemimpinan yang terlalu maskulin. Dengan menghadirkan Ratu Kalinyamat sebagai representasi kepemimpinan perempuan, penulis menemukan bukti historis bahwa perempuan tidak pernah absen dari ruang-ruang strategis kekuasaan. Kisah ini juga menjadi fondasi moral yang relevan untuk memperkuat legitimasi eksistensi perempuan dalam pemerintahan modern (Baharudin, 2022).

Narasi kepemimpinan Ratu Kalinyamat membuka dialog historis yang menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan perempuan bukanlah konstruksi sosial baru yang muncul akibat demokrasi modern, melainkan realitas yang telah terbukti dalam sejarah politik Nusantara. Keberadaan pemimpin perempuan dengan otoritas penuh pada abad ke-16 ini membuktikan bahwa kapasitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan strategis, visi politik, dan keberanian dalam mengambil keputusan pada momen-momen kritis (Hardian, 2023). Perspektif historis ini menantang logika patriarkal yang menganggap kepemimpinan sebagai identitas laki-laki, sekaligus memperlihatkan bahwa pembatasan perempuan dalam politik modern.

Dalam konteks perkembangan kajian gender dan politik kontemporer,

mengkaji ulang sosok Ratu Kalinyamat berarti mengaktifkan kembali ingatan historis masyarakat tentang peran signifikan perempuan dalam struktur kekuasaan. Penelitian historis menunjukkan bahwa figur seperti Ratu Kalinyamat memiliki karakter kepemimpinan transformasional yang berani, visioner, strategis, dan mampu menggerakkan dukungan sosial secara luas (Latujtaba & Nugraheni, 2025). Karakteristik ini sejalan dengan konsep kepemimpinan transformasional dalam studi kepemimpinan modern, yang menyoroti kapasitas pemimpin dalam mendorong perubahan melalui inspirasi dan penggerakan massa (Sofiah Sinaga et al., 2021). Konsep ini menegaskan bahwa nilai-nilai kepemimpinan perempuan memiliki substansi yang kuat dan dapat diintegrasikan ke dalam desain politik modern yang menekankan keadilan serta kesetaraan representasi.

Demi menghindari pembacaan yang bersifat deskriptif, artikel ini mengoperasionalkan konsep kepemimpinan transformasional sebagai alat analisis, bukan hanya sebagai label normatif. Terdapat empat indikator kepemimpinan transformasional yang dikemukakan Bass (1985) di antaranya; pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Empat indikator ini digunakan untuk membaca jejak kepemimpinan Ratu Kalinyamat secara lebih terukur. Keempat indikator tersebut kemudian dielaborasi ke dalam lima dimensi kontekstual yang lebih spesifik dengan posisi historis Ratu Kalinyamat sebagai penguasa maritim, yaitu legitimasi politik, kapasitas strategis, kepemimpinan maritim-militer, visi ekonomi, dan diplomasi regional. Kelima dimensi inilah yang digunakan secara konsisten pada bagian “Hasil dan Pembahasan” sebagai kerangka untuk merumuskan model kepemimpinan Ratu Kalinyamat serta menjembatani analisisnya dengan model kepemimpinan perempuan di era pemerintahan modern.

Dari perspektif ini, urgensi penelitian mengenai kepemimpinan Ratu Kalinyamat terletak pada kontribusinya dalam membangun fondasi konseptual untuk penguatan peran perempuan dalam pemerintahan masa kini. Mengangkat figur historis lokal sebagai rujukan model kepemimpinan perempuan menawarkan alternatif narasi yang lebih kontekstual secara empiris, sekaligus menegaskan bahwa perempuan memiliki legitimasi historis untuk memimpin tanpa perlu

dianggap inferior atau berada di bawah laki-laki. Pendekatan ini berpotensi memperluas diskusi akademik mengenai relasi gender dan kekuasaan, serta memberikan dasar normatif bagi penguatan afirmasi politik perempuan baik di tingkat nasional maupun regional.

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan Ratu Kalinyamat dapat dijadikan model bagi kepemimpinan perempuan pada masa kini. Melalui refleksi historis terhadap kiprah dan strategi politiknya, artikel ini bertujuan menyoroti eksistensi, kapasitas, dan legitimasi peran perempuan dalam pemerintahan modern, sekaligus menunjukkan bahwa pengalaman sejarah dapat menjadi rujukan penting untuk memperkuat posisi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan. Tahapannya meliputi pemilihan sumber, membaca dan mengkaji isi literatur, kemudian membandingkan temuan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk merekonstruksi peristiwa dan karakter kepemimpinan tokoh sejarah melalui jejak tertulis yang tersedia. Sumber yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori. Sumber primer berupa catatan historiografi dan laporan sezaman yang merekam aktivitas politik dan militer Ratu Kalinyamat, termasuk catatan pelaut dan pedagang Portugis yang berinteraksi langsung dengan Jepara pada abad ke-16. Sumber sekunder berupa artikel jurnal terakreditasi, buku sejarah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai Ratu Kalinyamat maupun kepemimpinan perempuan kontemporer. Batasan publikasi sumber sekunder diambil dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk menjaga relevansi akademik.

Kriteria pemilihan literatur mencakup tiga aspek, yaitu relevansi tema dengan kepemimpinan Ratu Kalinyamat atau kepemimpinan perempuan modern, kredibilitas penerbit atau jurnal, dan ketersediaan data historis yang dapat ditelusuri sumbernya. Adapun analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi

data, yakni memilah informasi yang relevan dengan lima dimensi kepemimpinan yang menjadi fokus kajian; (2) kategorisasi tematik, yakni mengelompokkan temuan ke dalam dimensi legitimasi politik, kapasitas strategis, kepemimpinan maritim-militer, visi ekonomi, dan diplomasi regional; dan (3) interpretasi komparatif, yakni membandingkan pola kepemimpinan Ratu Kalinyamat dengan indikator kepemimpinan transformasional dalam literatur kepemimpinan perempuan modern untuk menemukan titik temu dan perbedaan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Ratu Kalinyamat

Ratu Kalinyamat merupakan salah satu pemimpin perempuan paling berpengaruh di Jawa pada abad ke-16, khususnya dalam sejarah politik Jepara. Setelah melemahnya Kesultanan Demak, figur ini tampil sebagai aktor penting yang mampu mempertahankan stabilitas wilayah pesisir dan memulihkan kekuatan maritim Jepara (Hana & Wijaya, 2024). Perannya tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan lokal, tetapi juga kebijakan yang berorientasi pada pertahanan dan perdagangan laut. Jepara di bawah pemerintahannya tumbuh sebagai pelabuhan strategis yang menghubungkan jaringan dagang Asia Tenggara dan Samudra Hindia (Arrauf Nasution & Himawan, 2021).

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat, yang memiliki nama kecil Retna Kencana, berasal dari keluarga inti Kesultanan Demak. Kedudukannya sebagai putri Sultan Trenggana memberikan legitimasi politik yang kuat, terutama setelah terjadinya krisis suksesi yang memecah kekuasaan Demak pada pertengahan abad ke-16 (Achmad, 2019). Konflik internal yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Arya Penangsang berdampak besar pada dinamika kekuasaan. Dalam situasi inilah Retna Kencana tampil sebagai pemimpin perempuan yang mengambil posisi politik secara tegas di Jepara (Mukti & Sulisty, 2020), hal ini memperlihatkan bagaimana figur perempuan dapat memainkan peran strategis dalam pergolakan politik pesisir.

Kepemimpinan Ratu Kalinyamat ditandai dengan kemampuan membangun aliansi politik serta mengkokohkan kekuatan militer pesisir. Berbagai

sumber Portugis menggambarkan sebagai perempuan pemberani dan berpengaruh yang memiliki kekuatan ekonomi besar, sehingga ia dihormati sebagai penguasa maritim yang disegani (Latujtaba & Nugraheni, 2025). Di bawah kepemimpinannya, Jepara tidak hanya berhasil mempertahankan kedaulatan dari ancaman internal, tetapi juga berperan aktif dalam hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kekuatan asing.

Warisan paling menonjol dari Ratu Kalinyamat adalah keberhasilannya menjadikan Jepara sebagai kekuatan regional dengan armada laut yang kuat. Jepara pada abad ke-16 dikenal sebagai pusat pembuatan kapal dan basis ekspedisi militer Jawa, termasuk dalam upaya menghadapi dominasi Portugis di Selat Malaka (Rejeki, 2019). Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan pada masa itu bukanlah sesuatu yang menyimpang dari konteks zamannya, tetapi justru merupakan bagian penting dari dinamika politik Nusantara. Ratu Kalinyamat wafat pada tahun 1579, namun pengaruhnya terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan maritim Jepara tetap menjadi bagian penting dalam historiografi Jawa.

Kepemimpinan Ratu Kalinyamat

Kepemimpinan Ratu Kalinyamat sering dikategorikan sebagai kepemimpinan strategis, karena kemampuannya membaca situasi politik kompleks pada masa transisi pasca-Kerajaan Kesultanan Demak. Di saat Demak runtuh dan kekacauan perebutan tahta terjadi, Ratu Kalinyamat melalui kebijakannya berhasil menjaga stabilitas wilayah Jepara dan mempertahankan integritas kerajaan lokal. Studi "*Jejak Kepemimpinan Ratu Kalinyamat (De Kranige Dame)*" yang ditulis oleh (Inez Kalyana Azmi, 2024) menunjukkan bahwa di bawah pemerintahannya masyarakat Jepara menikmati masa makmur dari segi perdagangan, pelayaran, serta keamanan yang relatif terjaga. Keberhasilan stabilisasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Ratu Kalinyamat bukan semata warisan darah atau gelar, melainkan kemampuan manajerial dan politik yang matang.

Keberanian Ratu Kalinyamat tidak hanya tampak dalam pengelolaan

pemerintahan domestik, tetapi juga melalui mobilisasi kekuatan militer dan armada laut. Penelitian oleh (Supriyono, 2013) mengenai “*Jepara sebagai Kerajaan Maritim*” mencatat bahwa pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, armada laut Jepara berkembang menjadi kekuatan yang besar dan tangguh, bahkan digunakan dalam dua ekspedisi ke Malaka untuk menghadapi kekuatan asing, khususnya Portugis. Kemampuan mengorganisasi armada laut dan pasukan perang menunjukkan kapasitas logistik, komando, dan koordinasi yang tidak sederhana. Ini menandakan bahwa Kalinyamat menjalankan fungsi seperti pemimpin militer posisi yang sering dipersepsikan “maskulin” dalam narasi tradisional. Keberadaan armada ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan dan legitimasi politiknya diakui, setidaknya oleh komunitas maritim dan elit regional.

Aspek visioner dalam kepemimpinan Ratu Kalinyamat terlihat melalui kebijakan pembangunan pelabuhan dan infrastruktur maritim di Jepara. Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang menjadi pusat pelayaran, perdagangan, dan jaringan maritim yang menghubungkan Jawa dengan wilayah luar Nusantara. Strategi ini menunjukkan bahwa Kalinyamat memahami pentingnya ekonomi maritim sebagai basis kekuatan politik dan sosial. Kebijakan ini menunjukkan visi jangka panjang dan kemampuan merencanakan pembangunan struktural, menandakan bahwa kepemimpinannya memiliki dimensi ekonomis dan strategis, bukan hanya militer atau dinastik.

Ratu Kalinyamat juga menunjukkan kapasitas diplomatik yang kuat. Catatan sejarah dan kajian akademik menyebutkan bahwa armada Jepara pada masa pemerintahannya beberapa kali dilibatkan dalam aliansi regional, termasuk dengan penguasa Maluku dan Johor, untuk menghadapi ekspansi Portugis. Pengakuan dari kekuatan regional lain atas kemampuan dan otoritas Ratu Kalinyamat memperlihatkan bahwa kepemimpinannya memiliki legitimasi di tingkat internasional pada zamannya. Hal ini menegaskan bahwa perempuan dapat memainkan peran strategis dalam diplomasi dan politik luar negeri, serta memberikan preseden historis yang penting untuk membingkai ulang dialog kepemimpinan perempuan di masa kini.

Model Kepemimpinan Ratu Kalinyamat: Lima Dimensi Analitis

Berdasarkan pembacaan atas keempat aspek kepemimpinan Ratu Kalinyamat di atas, artikel ini merumuskan model kepemimpinannya ke dalam lima dimensi yang saling terkait. Pertama, legitimasi politik, yakni otoritas yang bersumber dari garis keturunan Kesultanan Demak sekaligus diperkuat oleh kemampuannya mengonsolidasikan kekuasaan di tengah krisis suksesi. Hal ini berdampak pada legitimasinya yang tidak semata bersifat askriptif tetapi juga dibangun melalui kinerja politik nyata. Kedua, kapasitas strategis, yang tercermin dari kemampuannya membaca situasi politik pascakeruntuhan Demak dan mengambil keputusan yang menjaga stabilitas Jepara.

Ketiga, kepemimpinan maritim-militer, yang ditunjukkan melalui kapasitas mengorganisasi armada laut dan ekspedisi militer ke Malaka. Sebuah fungsi komando yang secara sosial dipersepsikan maskulin dalam narasi historiografi konvensional. Keempat, visi ekonomi, terlihat dari kebijakan pembangunan pelabuhan dan infrastruktur maritim yang menempatkan Jepara sebagai simpul perdagangan regional. Kelima, diplomasi regional, yang tampak dari aliansi dengan Maluku dan Johor dalam menghadapi ekspansi Portugis. Kelima dimensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan di mana legitimasi politik menjadi basis bagi kapasitas strategis, yang kemudian diwujudkan secara konkret melalui kekuatan maritim-militer, visi ekonomi, dan diplomasi regional. Kelima dimensi inilah yang pada bagian berikut digunakan sebagai titik tolak untuk membaca relevansinya dengan model kepemimpinan perempuan di era pemerintahan modern.

Kepemimpinan Perempuan di Era Pemerintahan Modern

Wacana modern tentang kepemimpinan perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa pemimpin perempuan seringkali dipandang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda yaitu lebih kolaboratif, empatik, dan cenderung mengedepankan transformasi sosial. Studi *“Gaya Kepemimpinan Legislator Perempuan di Provinsi Bangka Belitung”* yang dilakukan oleh (Triwinarsih, 2025) menunjukkan bahwa wanita yang berada di posisi legislatif sering

menggunakan pendekatan partisipatif dan komunikatif dalam pengambilan keputusan. Karakteristik ini relevan jika dikomparasikan dengan figur historis seperti Ratu Kalinyamat. Di mana keduanya menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bisa berhasil lewat kombinasi kewibawaan dan gaya kolaboratif. Ini menegaskan bahwa bukan gender, melainkan kapasitas dan gaya kepemimpinan-lah yang menentukan efektivitas.

Namun, literatur lain menunjukkan bahwa perempuan dalam pemerintahan modern menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial, mulai dari norma patriarkal, stereotip gender, hingga keterbatasan dukungan dari partai atau institusi. Misalnya, artikel yang di tulis oleh (Baharudin, 2022) berjudul *“Perempuan dalam Kepemimpinan Politik di Indonesia”* mencatat bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan meningkat, kebijakan kuota dan dukungan partai sering tidak konsisten, sehingga kontribusi perempuan masih terbatas. Fakta ini menunjukkan bahwa hambatan terhadap perempuan hari ini lebih bersifat struktural dan kultural, bukan karena kekurangan kompetensi. Dengan mengangkat figur seperti Ratu Kalinyamat sebagai referensi historis, dapat ditunjukkan bahwa pembatasan gender bukanlah sesuatu yang ‘alami’ atau berasal dari budaya lokal, melainkan konstruksi sosial yang perlu ditransformasi

Dalam banyak kasus kontemporer, kepemimpinan perempuan diapresiasi ketika pemimpin tersebut menerapkan nilai-nilai transformasional seperti visi, pemberdayaan, inklusivitas, dan inovasi kebijakan. Sebuah studi oleh (Frenandes, 2025) memaparkan bahwa pemimpin perempuan di lembaga legislatif dan pemerintahan yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap figur perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Dengan ini, kepemimpinan Ratu Kalinyamat menawarkan refleksi historis terhadap pentingnya pemahaman peran perempuan dalam pemerintahan modern. Rekam jeaknya menegaskan bahwa efektivitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas merumuskan strategi, membangun legitimasi politik, serta menavigasi dinamika kekuasaan dalam konteks sosial yang kompleks. Di tengah berbagai hambatan struktural yang masih

membatasi ruang politik perempuan pada masa kini, sosok Kalinyamat menjadi bukti historis bahwa perempuan pernah memiliki pengaruh politik yang signifikan dan diakui pada tingkat regional. Rujukan historis semacam ini memberikan dasar argumentatif yang kuat bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah penyimpangan dari tradisi, melainkan bagian dari kontinuitas pengalaman politik Nusantara. Dengan demikian, pengalaman kepemimpinan Kalinyamat dapat diposisikan sebagai legitimasi simbolik sekaligus konseptual bagi penguatan peran perempuan dalam pemerintahan kontemporer.

Jika kelima dimensi kepemimpinan Ratu Kalinyamat dihubungkan secara langsung dengan indikator kepemimpinan transformasional yang telah dijelaskan pada bagian kerangka konsep, tampak kesejajaran yang cukup jelas. Legitimasi politik dan kapasitas strategisnya sejalan dengan indikator pengaruh ideal, karena otoritasnya dibangun melalui kinerja nyata yang menumbuhkan kepercayaan, bukan sekadar warisan gelar. Kepemimpinan maritim-militer dan visi ekonominya mencerminkan stimulasi intelektual dan motivasi inspirasional, sebagaimana terlihat pada gaya kepemimpinan transformasional legislator perempuan kontemporer yang diteliti oleh Triwinarsih (2025). Hal ini juga mengandalkan pendekatan strategis dan partisipatif untuk membangun legitimasi. Sementara itu, diplomasi regionalnya menunjukkan kesamaan fungsi dengan pertimbangan individual dalam membangun aliansi lintas kekuatan (Frenandes dkk, 2025). Kesejajaran ini menegaskan bahwa relevansi Ratu Kalinyamat terhadap kepemimpinan perempuan modern bukan sekadar analogi historis, melainkan dapat ditelusuri secara konseptual melalui kesamaan pola pada level indikator kepemimpinan.

Meski demikian, analogi ini perlu dibaca secara hati-hati. Sebagian besar sumber mengenai Ratu Kalinyamat berasal dari catatan Portugis dan historiografi lokal yang ditulis dari sudut pandang elit, sehingga berpotensi melebih-lebihkan sisi heroik kepemimpinannya sementara meminggirkan sisi konflik atau keterbatasan yang mungkin turut mewarnai pemerintahannya. Konteks politik abad ke-16 yang bersifat monarkis-personal juga berbeda secara mendasar dari sistem pemerintahan modern yang demokratis, birokratis, dan berbasis

akuntabilitas public. Dengan demikian, model kepemimpinan Ratu Kalinyamat lebih tepat diposisikan sebagai rujukan inspiratif dan preseden historis, bukan sebagai *blueprint* yang dapat diterapkan secara langsung pada tata kelola pemerintahan masa kini.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Ratu Kalinyamat dari abad ke-16 menunjukkan bahwa figur historis ini merupakan legitimasi kuat bagi eksistensi dan efektivitas kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan modern, menantang narasi patriarkal yang masih menghambat partisipasi perempuan. Ratu Kalinyamat, dengan kapasitas strategisnya dalam politik, militer maritim, perdagangan, dan diplomasi, membuktikan bahwa kepemimpinan yang berhasil tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh visi, kemampuan manajerial, dan keberanian mengambil keputusan. Kisah kepemimpinannya memberikan fondasi historis yang menentang anggapan bahwa pembatasan perempuan dalam politik modern bersifat alami atau bawaan budaya, sebaliknya menegaskan bahwa kapasitas kepemimpinan perempuan adalah bagian integral dari pengalaman politik Nusantara yang dapat menjadi rujukan signifikan untuk penguatan peran perempuan kontemporer. Melalui kerangka lima dimensi (legitimasi politik, kapasitas strategis, kepemimpinan maritim-militer, visi ekonomi, dan diplomasi regional), artikel ini menunjukkan bahwa relevansi Ratu Kalinyamat terhadap kepemimpinan perempuan modern dapat ditelusuri secara konseptual, bukan sekadar afirmasi normatif. Penelitian lanjutan tetap diperlukan untuk menguji kerangka ini pada figur kepemimpinan perempuan historis lain di Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. W. (2019). *Ratu Kalinyamat: Kisah Cinta, Dendam dan Tahta*. Araska.
- Arrauf Nasution, I. F., & Himawan, A. H. (2021). Demak as the Maritime Kingdom on the North Coast of Java. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(1), 1–12. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i1.25997>
- Aula, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 186–201.
- Baharudin. (2022). Perempuan dalam Kepemimpinan Politik di Indonesia. *Harakat An-Nisa*, 7(02), 65–72.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
- Frenandes, B., Auliana, C., Hendrawan, D. A., Hanoselina, Y., & Syafril, R. (2025). Kepemimpinan Transformasional Puan Maharani Dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 2049–2061.
- Hana, M. Y., & Wijaya, D. N. (2024). Ekspansi Jepara Abad XVI dan Potensinya Sebagai Supelmen Materi Pembelajaran Sejarah. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 20(1), 43–59.
- Hardian, A. (2023). Dampak Pemerintahan Ratu Kalinyamat Terhadap Sistem Politik Dan Ekonomi Jepara Pada Tahun 1549-1579. *Historia Vitae*, 03(01), 39–46.
- Inez Kalyana Azmi, R. (2024). Jejak Kepemimpinan Ratu Kalinyamat (De Kranige Dame). *Historia Pedagogia*, 13(02), 32–41.
- Latujtaba, A., & Nugraheni, L. (2025). Representasi Kepemimpinan Ratu Kalinyamat dalam Narasi “Ratu Kalinyamat: Perempuan Perintis Antikolonialisme (1549–1579)”. *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.59632/leksikon.v3i1.426>
- Mukti, A. J. N., & Sulisty, W. D. (2020). Pergolakan Politik Kasultanan Demak dan Ambisi Arya Penangsang sebagai Sultan Demak ke-4 Tahun 1546-1549. *Yupa: Historical Studies Journal*, 3(2), 69–78. <https://doi.org/10.30872/yupa.v3i2.170>
- Rejeki, K. S. (2019). Peranan Ratu Kalinyamat Dalam Perkembangan Kota Jepara (1549-1579). *Sosio E-Kons*, 11(2), 174–182.
- Sofiah Sinaga, N., Aprilinda, D., & Putra Budiman, A. (2021). Konsep Kepemimpinan Transformasional. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 840–846.
- Supriyono, A. (2013). Tinjauan Historis Jepara Sebagai Kerajaan Maritim Dan

Kota Pelabuhan. *Paramita*, 23(1), 27–39.

Triwinarsih, R., Destari, D., Saputra, E., & Putrimaz, A. K. (2025). Gaya Kepemimpinan Legislator Perempuan di Provinsi Bangka Belitung: Studi Kasus Terhadap Me Hoa Ketua DPRD Bangka Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 83–91. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.23119>